

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) memberikan penjelasan bahwa niat berperilaku (*behavioral intention*) tidak hanya dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku (*attitude towards behavior*) dan norma subyektif (*subjective norm*), namun dipengaruhi juga oleh kontrol berperilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*). Menurut Azwar (2003) kontrol berperilaku yang dirasakan dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan perkiraan dari seseorang tentang sulit atau tidaknya untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, niat merupakan fungsi dari tiga determinan, pertama yang bersifat personal, kedua merefleksikan pengaruh sosial dan ketiga berhubungan dengan masalah kontrol (Ajzen, 2005).

Hubungan antara *Theory of Planned Behavior* dengan penelitian ini yaitu apabila didalam diri UMKM sudah timbul niat untuk melakukan pembukuan dalam usahanya, dimana niat ini bisa timbul karena adanya pemberian informasi dan juga sosialisasi mengenai manfaat yang akan didapatkan oleh UMKM apabila melakukan pembukuan. Jika niat sudah timbul dalam diri UMKM kemudian akan ada determinan sikap seseorang terhadap perilaku maka seseorang tersebut akan memiliki keyakinan untuk melakukan pembukuan, dimana keyakinan ini berkaitan dengan norma subyektif yang terdapat keyakinan seseorang untuk menyetujui atau tidak untuk melakukan pembukuan. Bukan hanya itu apabila UMKM memiliki pengetahuan mengenai akuntansi pada masa lalu yang didaparkannya melalui pendidikan seperti yang dijelaskan pada salah satu determinan teori ini yaitu persepsi mengenai control perilaku, dimana kejadian dimasa lalu dan persepsi mengenai kemudahan dalam menyusun laporan keuangan akan meningkatkan pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

2.2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tahun 2009 telah menerbitkan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang juga diintensifikan untuk digunakan oleh entitas kecil dan menengah. SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP karena mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh EMKM. Dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis, sehingga EMKM cukup mencatat aset dan liabilitas sebesar biaya perolehannya. Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tanggal 18 Mei 2016 dan berlaku secara efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai tanggal 1 Januari 2018.

Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM Cara penyajian laporan keuangan EMKM telah disusun secara rinci pada SAK EMKM yang penyajiannya harus konsisten dan lengkap. Laporan keuangan tersebut minimal terdiri dari:

- a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode (neraca),
 - b. Laporan laba rugi selama periode (laporan laba/rugi),
 - c. Catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan.
- Laporan Posisi Keuangan Pada Akhir Periode Informasi laporan posisi keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu, dan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Unsur-unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut :
 1. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari mana manfaat ekonomik di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh entitas.

2. Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik.
3. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas dikurangi seluruh liabilitasnya.

Informasi yang disajikan dalam Laporan posisi keuangan entitas mencakup pos – pos berikut:

- 1) Kas dan setara kas
 - 2) Piutang
 - 3) Persediaan
 - 4) Asset tetap
 - 5) Utang usaha
 - 6) Utang bank
 - 7) Ekuitas
- Laporan Laba Rugi Selama Periode Informasi kinerja keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan, dan disajikan dalam laporan laba rugi. Unsur–unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut :
 1. Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomik selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau kenaikan aset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.
 2. Beban (expense) adalah penurunan manfaat ekonomik selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset, atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanam modal.

Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi entitas dapat mencakup pos – pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan
- 2) Beban keuangan

3) Beban pajak

- Catatan Atas Laporan Keuangan, yang berisi tambahan dan rincian pos - pos tertentu yang relevan catatan laporan keuangan, memuat :
 1. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai SAK EMKM
 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
 3. Informasi tambahan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan

2.3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2.3.1. Definisi UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Undang-undang yang dikeluarkan pemerintah tentang usaha mikro,kecil dan menengah adalah UU No. 20 tahun 2008 pasal 1 disebutkan bahwa :

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kreteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang undang ini.
2. Usaha kecil dan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasain, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kreteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang UU no.20 tahun 2008 pasal 6 adalah sebagai berikut:

a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau pengahsilan perbulan kurng dari Rp.5.000.000

b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :

- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua lima milyar lima ratus juta rupiah) atau penghasilan Rp.5.000.000-Rp.25.000.000 perbulan
- c. Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:
- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) atau penghasilan Rp.25.000.000-Rp.300.000.000 perbulan

2.3.2. Definisi UMKM Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

Badan pusat statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja, menurut BPS batasan UMKM adalah:

- Usaha mikro: usaha yang memiliki pekerja kurang dari 5 orang, termasuk tambahan anggota keluarga yang tidak dibayar.
- Usaha mikro kecil: usaha yang memiliki pekerja 5-19 orang.
- Usaha menengah: usaha yang memiliki pekerja 20-99 orang.

2.3.3. Definisi UMKM Menurut Bank Indonesia (BI)

UMKM adalah perusahaan atau industri dengan karakteristik berupa :

- Modalnya kurang dari Rp 20 juta.
- Untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp. 5 juta.
- Memiliki aset maksimum Rp. 600 juta di luar tanah dan bangunan.
- Omzet pertahanun kurang lebih Rp. 1 miliar.

2.3.4. Jenis- jenis Usaha Mikro, kecil,dan Menengah

Berikut jenis-jenis usaha mikro,kecil, dan menengah (UMKM) menurut nayla (2015:84):

- UMKM bidang perdagangan

UMKM bidang perdagangan digolongkan menjadi dua yaitu UMKM retail (eceran) dan grosir (besar).

- **UMKM Bidang Industri**

Berdasarkan proses produksinya, UMKM bidang industri dibagi menjadi tiga jenis, yaitu UMKM pengolahan barang mentah menjadi bahan baku, UMKM pengolahan bahan baku menjadi setengah jadi, dan UMKM pengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi.

- **UMKM Bidang Jasa**

UMKM bidang jasa merupakan jenis UMKM yang bergerak dalam bidang yang menjual jasa yang di perlukan konsumen. Ciri khusus dari UMKM bidang jasa ini produk jasa yang ditawarkan kepada konsumen tidak berwujud hanya bisa di rasakan manfaatnya.

- **UMKM Bidang Agraris**

UMKM bidang agraris merupakan jenis UMKM yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbarui, sehingga dapat memberikan manfaat atau mendatangkan keuntungan. Berdasarkan lapangan usahanya UMKM di bidang agraris dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu UMKM perkebunan, UMKM peternakan, UMKM pertanian, UMKM perikanan.

- **UMKM Bidang Ekstraktif**

UMKM bidang ekstraktif merupakan jenis UMKM yang beroperasi dalam bidang pengambilan hasil alam secara langsung, baik dengan mengubah bentuk dan zatnya maupun tidak. Berdasarkan proses kerjanya, UMKM bidang ekstraktif dikelompokkan menjadi dua, yaitu UMKM penebangan kayu dan UMKM pertambangan.

2.3.5. Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Berdasarkan Kementrian Koperasi dan UMKM (2015), peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia dapat dilihat dari :

- Kedudukan sebagai pelaku utama dalam kegiatan indonesia di berbagai sektor
- Penyedia lapangan pekerjaan yang besar

- Pemain penting dalam pengembangan aktivitas ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat
- Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

2.4. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pemahaman UMKM Dalam Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan SAK EMKM

2.4.1. Tingkat pendidikan

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Tingkat Pendidikan meliputi SD, SMP sederajat, SMA sederajat, diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis. Tingginya tingkat pendidikan masyarakat penting bagi kesiapan menghadapi tantangan global. Tingkat pendidikan yang tinggi akan memudahkan seseorang dalam menyerap informasi yang ada.

Maufur & Hartinah (2010) dalam bukunya pengantar pendidikan menyebutkan bahwa pendidikan adalah upaya sadar pendidik dalam memberikan kesempatan kepada para peserta didik dengan berbagai cara untuk dapat mengembangkan berbagai potensi positif secara maksimal dan menghambat potensi negatif yang dimiliki, agar dapat menjadi diri sendiri dan juga warga negara yang baik, dan berlangsung sepanjang hayat dimana pun yang bersangkutan berada. Sedangkan untuk Tingkat Pendidikan merupakan suatu kondisi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang yang didapatkan melalui pendidikan formal dan telah disahkan oleh Departemen Pendidikan sebagai usaha guna mengembangkan potensi didalam dirinya untuk mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, kecerdasan, kepribadian, pengendalian diri, akhlak mulia, dan juga keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Lohanda, 2017). Tingkat pendidikan yang telah ditempuh oleh seseorang akan mempengaruhi pola pikir dan kemampuan dalam menganalisa sejauh mana dia bisa memahami laporan keuangan yang dibuat untuk usahanya, semakin tinggi tingkat pendidikan

seseorang semakin mudah dalam menyusun laporan keuangan usahanya. Selain itu pelaku umkm yang telah menempuh pendidikan lebih tinggi pasti sudah menyusun laporan keuangan karena mereka paham bahwa penting untuk membuat laporan keuangan bagi usaha mereka.

2.4.2. Latar Belakang Pendidikan

Latar belakang pendidikan bidang studi atau jurusan yang dijalankan oleh pelaku UMKM Tuti & Dwijayanti (2014). Diana, (2018) menyebutkan bahwa latar belakang pendidikan merupakan bidang pendidikan yang telah ditempuh oleh pengusaha yang meliputi bidang, akuntansi, manajemen, ekonomi atau sejenisnya. Prakoso dkk (2019) mendefinisikan latar belakang pendidikan sebagai suatu yang bisa membedakan mengenai tinggi rendahnya tingkat pemahaman yang dimiliki oleh pemilik UKM.

Julyanda & Rejeki (2018) menyatakan bahwa Latar belakang pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 3 menjelaskan, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pengertian latar belakang pendidikan disini adalah latar belakang pendidikan formal. Latar belakang pendidikan pelaku UMKM bisa mempengaruhi persepsi pelaku UMKM tersebut mengenai betapa pentingnya melakukan pembukuan dan juga pelaporan keuangan usahanya untuk pertumbuhan dan perkembangan usahanya. Pengetahuan tentang akuntansi, khususnya mengenai fungsi laporan keuangan diperoleh jika seseorang menjalani pendidikan akuntansi. Pelaku usaha yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi diyakini dapat memiliki persepsi yang lebih baik tentang SAK EMKM

dibandingkan dengan pelaku usaha yang memiliki latar belakang selain akuntansi (Rudiantoro & Siregar, 2012)

2.4.3. Ukuran Usaha

Ukuran usaha adalah suatu penilaian yang digunakan dalam menunjukkan suatu kondisi usaha dimana terdapat beberapa parameter yang digunakan untuk menentukan ukuran (besar/kecil) suatu usaha, contohnya seperti banyak jumlah karyawan yang digunakan untuk menjalankan usaha dan jumlah aktiva yang dimiliki, dan total penjualan yang dicapai menurut Devi dkk, (2017) dan Suastini dkk (2019) mendefinisikan ukuran usaha adalah skala yang menunjukkan besar atau kecilnya sebuah organisasi atau perusahaan yang dapat diukur menggunakan beberapa cara. Seperti yang telah tertulis dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bahwa ukuran usaha juga dapat di kategorikan kedalam beberapa jenis kategori, yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.

Adino (2019) menyebutkan bahwa ukuran merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam mengelola usahanya dengan melihat berapa jumlah karyawan yang dipekerjakan dan berapa jumlah pendapatan yang didapatkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Jumlah penjualan atau pendapatan yang diperoleh perusahaan dapat menunjukkan perputaran modal atau aset yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga semakin besar pendapatan yang diperoleh maka akan semakin besar tingkat kompleksitas perusahaan dalam memaksimalkan informasi akuntansi (Julyanda & Rejeki, 2018)

Nugroho (2017) Mendefinisikan ukuran usaha dapat didefinisikan sebagai tingkatan yang dapat menunjukkan besar atau kecilnya sebuah perusahaan, dilihat dari jumlah karyawan, volume penjualan serta nilai aset yang dimiliki. Definisi tersebut selaras dengan Haryani (2018) yang mendefinisikan ukuran usaha sebagai suatu skala yang menentukan besar kecilnya usaha yang dapat dilihat dari jumlah

karyawan, asset usaha, dan penjualan usaha merupakan variabel konteks yang mengukur tuntutan atau pelayanan atau produk suatu organisasi. Ukuran usaha dapat mempengaruhi pemikiran para pengusaha terkait dengan kompleksitas dan semakin tingginya tingkat transaksi perusahaan sehingga diharapkan makin besar ukuran usaha maka dapat mendorong seseorang dalam berfikir dan belajar terkait solusi untuk menghadapinya. Semakin besar usaha maka pemiliknya mulai memikirkan pentingnya suatu pembukuan dan pencatatan keuangan untuk membantu dalam pengelolaan aset dan penilaian kinerja keuangannya (Pratiwi & Hanafi, 2016)

2.4.4. Pemberian Informasi dan Sosialisasi

(Winarno, 2016) Menyebutkan informasi adalah data yang telah diolah menjadi data yang dapat berguna untuk mengambil keputusan yang akan dilakukan. Informasi juga dapat didefinisikan sebagai sekumpulan fakta yang dimana fakta tersebut bisa diolah ke dalam bentuk data, sehingga dapat menjadi informasi yang lebih berguna dan dapat digunakan oleh siapa saja yang membutuhkannya sebagai pengetahuan dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan (Nugroho, 2017),

Sosialisasi SAK EMKM adalah pemberian informasi dari pihak yang telah memahami SAK EMKM kepada para pelaku UMKM sehingga dapat menjalankan usahanya sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Sosialisasi SAK EMKM juga dapat didefinisikan sebagai sosialisasi yang diperoleh pelaku UMKM tentang SAK EMKM dari pihak-pihak- terkait yang dapat memberikan sosialisasi (Nurdwijayanti & Sulastiningsih, 2018).

Sedangkan Rudiantoro & Siregar (2012) mendefinisikan pemberian informasi dan sosialisasi yaitu usaha yang dilakukan oleh IAI dan juga lembaga yang terkait dalam melakukan proses sosialisasi mengenai SAK EMKM. Apabila pelaku usaha bisa memperoleh informasi dan juga sosialisasi secara baik maka tingkat pemahaman mengenai SAK EMKM akan menjadi lebih mudah diterapkan (Haryani, 2018).

2.5. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

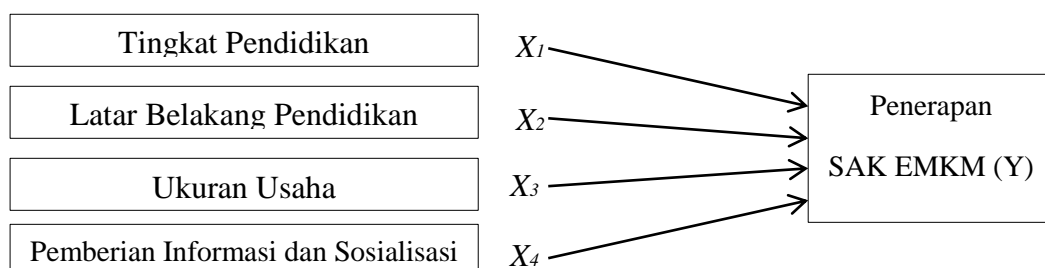
No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Bebas dan Variabel Terikat	Hasil
1.	Sri Ayu Sulistyawati (2020)	Pengaruh tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, ukuran usaha, pemberian informasi dan sosialisasi terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM : studi Kasus Pada Usaha Kecil Kabupaten Tegal)	Variabel Bebas: 1. Tingkat pendidikan 2. Latar belakang pendidikan 3. Ukuran usaha 4. Pemberian informasi dan sosialisasi Variabel Terikat Pemahaman pelaku UMKM Dalam Menyusun Laporan Keuangan SAK EMKM	Hanya Variabel Ukuran Usaha Berpengaruh Posistif sedangkan Variabel Tingkat Pendidikan, Latar Belakang Pendidikan, dan Pemberian Informasi dan sosialisasi Tidak berpengaruh
2.	Intan Adino (2019)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap SAK EMKM : Survey Pada UMKM Yang Terdaftar Di Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru	Variabel Bebas: 1. Sosialisasi SAK EMKM 2. Tingkat Pendidikan 3. Skala Usaha 4. Umur Usaha Variabel Terikat: Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap SAK EMKM	Sosialisasi SAK EMKM, tingkat Pendidikan Berpengaruh Sedangkan Skala Usaha, Umur Usaha Tidak Berpengaruh
3.	Dwi Haryani (2018)	Pengaruh Jenjang Pendidikan, Ukuran Usaha, Serta Informasi Dan Sosialisasi Terhadap Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) (Studi Pada UMKM Tembaga Tumang)	Variabel Bebas: 1. Jenjang Pendidikan 2. Ukuran usaha 3. Informasi dan Sosialisasi Variabel Terikat: Pemahaman UMKM Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP	Jenjang Pendidikan, Ukuran Usaha, Informasi dan Sosialisasi Berpengaruh
4.	Adi Wibowo, Rorim Panday, Siti Mardiyah, Arif Prasetyo (2018)	<i>Analysis Of The Factors Affecting Understanding Of Small And Medium Businesses In Preparing Financial Reports</i>	Variabel Bebas: 1. Tingkat Informas Tentang SAK EMKM 2. Latar Belakang Pendidikan	Informasi dan Sosialisasi Serta Ukuran Usaha Berpengaruh Sedangkan Persepsi Pemilik

			3. Tingkat Pendidikan Variabel Terikat: Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM)	Tidak Berpengaruh
5.	Nur Diana (2018)	<i>Financial Accounting Standards For Micro, Small & Medium Entities (SAK EMKM) Implementation And Factors That Affect It</i>	Variabel Bebas: 1. Tingkat Informasi Tentang SAK EMKM 2. Latar Belakang Pendidikan 3. Tingkat Pendidikan Variabel Terikat: Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM)	Tingkat Informasi Tentang SAK EMKM, Latar Belakang Pendidikan dan Tingkat Pendidikan Berpengaruh

2.6. Kerangka pemikiran

Pada penelitian ini terdapat 4 variabel independen yaitu tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, ukuran usaha, pemberian informasi dan sosialisasi. Sedangkan variabel dependen adalah penerapan SAK EMKM.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.7. Bangunan Hipotesis

2.7.1. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Pemahaman UMKM Dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Pelaku usaha yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, cenderung akan mempunyai tingkat pemahaman mengenai SAK EMKM yang lebih tinggi pula. Hal ini dikarenakan mereka memahami betapa pentingnya melakukan pembukuan dan melakukan pelaporan keuangan mengenai usaha yang dijalankannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin memudahkan seseorang untuk menyerap informasi mengenai SAK EMKM dan menerapkannya. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Adino (2019), Diana (2018), Purwaningsih (2018), dan Haryani (2018) yang menyebutkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman pelaku UMKM tentang SAK EMKM. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang telah ditempuh pelaku UMKM, maka akan semakin tinggi pula pemahaman pelaku UMKM dalam menyusun laporan SAK EMKM.

H₁ : Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

2.7.2. Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Terhadap Pemahaman UMKM Dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Pelaku UMKM yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi akan cenderung memiliki tingkat pemahaman mengenai SAK EMKM yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan pada saat menempuh pendidikan pelaku UMKM mendapat pengetahuan mengenai akuntansi yang khususnya dalam menyusun pelaporan keuangan dan manfaat yang didapatkan apabila menerapkan pelaporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dalam usaha yang sedang dijalankannya. Pelaku UMKM yang mempunyai latar belakang pendidikan ekonomi akan lebih mudah dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM karena pelaku UMKM telah mampu membuat laporan keuangan yang kemudian disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku yaitu SAK EMKM.

yang lebih baik daripada pelaku UMKM yang memiliki latar belakang pendidikan selain akuntansi.

Hal ini didukung oleh penelitian Diana (2018), Prawesti (2017), dan Maharani (2016) yang membuktikan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam menerapkan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Hal ini berarti pelaku UMKM yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau ekonomi akan mempunyai pemahaman yang lebih baik daripada pelaku UMKM yang memiliki latar belakang pendidikan selain akuntansi.

H₂ : Latar Belakang Pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

2.7.3. Pengaruh Ukuran Usaha Terhadap Pemahaman UMKM Dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM.

Semakin besar ukuran usaha yang dimiliki oleh pelaku UMKM maka akan mempengaruhi pemahaman dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran usaha akan semakin besar pula kebutuhan modal usaha yang diperlukan pelaku UMKM tersebut untuk menjalankan usahanya. Apabila pelaku UMKM tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan modalnya itu, maka diperlukan suntikan dana dari pihak ketiga, dimana pihak ketiga tersebut akan meminta bukti kelayakan usaha yang tengah dijalani dengan meminta laporan keuangan kepada pihak UMKM. Desakan kebutuhan modal inilah yang akan mendorong pelaku UMKM untuk berfikir dan mulai belajar memahami mengenai penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Suastini dkk (2019), Haryani (2018), Wibowo dkk (2018), Nugroho (2017), dan Maharani (2016) yang memberikan kesimpulan bahwa ukuran usaha berpengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Artinya semakin besar ukuran usaha yang dimiliki oleh pelaku UMKM

maka akan semakin tinggi pula pemahaman UMKM dalam Menyusun Laporan keuangan yang berdasarkan SAK EMKM.

H₃ : Ukuran Usaha berpengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

2.7.4. Pengaruh Pemberian Informasi dan Sosialisasi terhadap Pemahaman UMKM Dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM.

Pemberian informasi dan sosialisasi yang diberikan oleh IAI, lembaga terkait maupun pihak lain yang terkait kepada pelaku UMKM akan mempengaruhi pemahaman pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Hal ini dikarenakan informasi dan juga sosialisasi akan memberikan pengetahuan mengenai laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM, sehingga akan mempengaruhi pemahaman pelaku UMKM tersebut. Semakin sering pelaku UMKM mendapatkan informasi dan sosialisasi maka pelaku UMKM tersebut akan lebih memahami bagaimana menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dan juga memahami seberapa pentingnya melakukan pembukuan dan juga melakukan pelaporan keuangan untuk usahanya

Hal ini didukung oleh penelitian Purwaningsih (2018), Haryani (2018), Wibowo dkk (2018). Diana (2018), Nugroho (2017), dan Maharani (2016) yang memberikan hasil bahwa pemberian informasi dan sosialisasi berpengaruh terhadap pemahaman mengenai SAK EMKM. Artinya pemberian Informasi dan sosialisai merupakan faktor yang menentukan tingkat pemahaman atas SAK EMKM

H₄ : Pemberian Infromasi dan Sosialisasi berpengaruh terhadap Pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasrkan SAK EMKM.